

Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pelaporan Realisasi Anggaran BLUD di Puskesmas Kabupaten Bima

Nurul Mutmainnah¹

Hidayatullah²

^{1,2}Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta

¹nurmahputriy@gmail.com

²hidayatullah@amayogyakarta.ac.id

Abstract

This research analyzes the factors causing delays in the reporting of Budget Realization Reports (LRA) at BLUD Puskesmas in Bima Regency in 2023. Two main factors identified are the newly established BLUD status and the limited human resources (HR) in finance. Puskesmas, which was newly designated as BLUD in December 2021, faced difficulties in preparing financial reports according to procedures, with many staff members untrained in financial reporting. Additionally, the broad and diverse geographical location of Bima Regency, with some Puskesmas in remote areas with limited internet access, hindered the reporting process and caused delays. To address these challenges, the Bima Regency Health Office has taken steps such as providing guidance and assistance by BPKAD and Inspectorate teams, monthly reconciliation related to LRA, and the procurement of IT-based applications. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving in-depth interviews, direct observation, and document analysis, which are analyzed using thematic analysis methods.

Keywords: Reporting delays, Budget Realization Report (LRA), BLUD Puskesmas, Human resources (HR), Regional Government Information System (SIPD)

PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat, atau yang lebih dikenal sebagai Puskesmas, adalah institusi layanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan fokus utama pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan, setiap Puskesmas diwajibkan untuk mematuhi standar akreditasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam upaya mendukung operasional Puskesmas, pemerintah juga telah mengeluarkan

pedoman dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di Puskesmas (BPK RI, 2024).

BLUD adalah sistem yang diterapkan untuk memberikan layanan yang lebih efisien, efektif, dan ekonomis kepada masyarakat dengan tetap mempertahankan praktik bisnis yang sehat. Sistem ini tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih pada peningkatan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Implementasi BLUD di Puskesmas memungkinkan mereka untuk mengelola keuangan secara lebih fleksibel dan profesional, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan kesehatan yang mereka berikan (BPK RI, 2024)

Dalam implementasinya, Puskesmas yang telah berstatus BLUD diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007. LRA adalah laporan yang membandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta pengeluaran Puskesmas. Laporan ini penting untuk memberikan informasi kepada pejabat kesehatan dan pemerintah mengenai seberapa baik Puskesmas menjalankan anggarannya sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Laporan realisasi anggaran memiliki peran vital dalam pengelolaan keuangan Puskesmas karena memungkinkan evaluasi terhadap alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini disajikan setidaknya sekali dalam setahun dan mencakup pos-pos seperti pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan bersih, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan merupakan tuntutan utama bagi BLUD, untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan (Rahayu, A., 2023)

Penelitian sebelumnya oleh Andayani dan Suryani (Andayani, S., & Suryani, 2021) mengidentifikasi bahwa faktor internal seperti keterbatasan

pengetahuan dan keterampilan staf keuangan serta faktor eksternal seperti perubahan regulasi dan ketidakpastian dalam penyaluran dana seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan pelaporan. Selain itu, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam Puskesmas juga memainkan peran penting dalam keterlambatan tersebut. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah seringkali menyebabkan penundaan dalam pelaporan anggaran.

Lebih lanjut, Pratama dan Rahmawati (Pratama, Y., & Rahmawati, 2022) menyatakan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan untuk pelaporan anggaran sering kali belum memadai dan tidak user-friendly, yang menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam proses pelaporan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa implementasi sistem pelaporan yang lebih modern dan terintegrasi dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk pelaporan dan meningkatkan akurasi data yang dilaporkan.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan pelaporan LRA di Puskesmas yang berstatus BLUD. Di Kabupaten Bima, misalnya, pelaporan LRA untuk tahun anggaran 2023 mengalami keterlambatan. Pelaporan yang seharusnya disampaikan sejak Januari 2024 baru dapat diselesaikan pada Maret 2024. Keterlambatan ini tidak hanya mengganggu proses administrasi internal Puskesmas, tetapi juga berdampak pada keterlambatan penyelesaian laporan keuangan konsolidasi Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima.

Pelaporan realisasi anggaran merupakan salah satu aspek krusial dalam manajemen keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas. Keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran dapat berdampak negatif pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu, keterlambatan ini juga menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat waktu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Bima, keterlambatan pelaporan realisasi anggaran BLUD di Puskesmas masih menjadi permasalahan yang signifikan. Beberapa faktor yang

diduga mempengaruhi keterlambatan ini antara lain adalah kapasitas sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelaporan, serta tingkat koordinasi antar bagian yang terkait. Sumber daya manusia yang terbatas dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis sering kali menjadi penghambat utama dalam proses pelaporan yang tepat waktu. Selain itu, sistem pelaporan yang kurang efisien dan kompleksitas prosedur administrasi juga berkontribusi terhadap keterlambatan ini.

Keterlambatan pelaporan LRA ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Apakah kendala tersebut berasal dari aspek teknis, administratif, atau sumber daya manusia? Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada “Faktor-Faktor Keterlambatan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima NTB” untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan LRA di Puskesmas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pelaporan

Menurut Terry (Terry, George R., Rue, Leslie W., 2014), pelaporan adalah informasi yang diberikan oleh organisasi pelapor kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pelaporan dapat berupa entri jurnal, pernyataan tujuan, atau jenis dokumen apapun yang mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Pelaporan memiliki berbagai aplikasi, seperti menjelaskan kejadian, peristiwa, atau aktivitas, mengumpulkan data statistik, atau memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait.

1) Tujuan pelaporan

Tujuan utama pelaporan adalah untuk :

- a) Memberikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b) Membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.
- c) Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
- d) Mendukung pengendalian internal dan manajemen risiko.
- e) Memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan.

2) Jenis-jenis Pelaporan

Terdapat berbagai jenis pelaporan, antara lain:

- a) Pelaporan keuangan: Menyajikan informasi keuangan suatu entitas, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.
- b) Pelaporan kinerja: Menyajikan informasi tentang kinerja suatu entitas dalam mencapai tujuannya.
- c) Pelaporan manajemen: Menyajikan informasi tentang aktivitas dan keputusan manajemen suatu entitas.
- d) Pelaporan operasional: Menyajikan informasi tentang kegiatan sehari-hari suatu entitas.
- e) Pelaporan audit: Menyajikan hasil pemeriksaan suatu entitas oleh auditor independen.

3) Karakteristik Pelaporan yang Efektif

Pelaporan yang efektif harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Akurat: Informasi yang disampaikan harus benar dan bebas dari kesalahan.
- b) Relevan: Informasi yang disampaikan harus relevan dengan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan.
- c) Tepat waktu: Informasi harus disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Jelas: Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.
- e) Lengkap: Informasi yang disampaikan harus lengkap dan mencakup semua aspek yang penting.
- f) Objektif: Informasi yang disampaikan harus objektif dan tidak memihak.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan peraturan (BPK.RI, 2020), laporan realisasi anggaran (LRA) Puskesmas adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi daripada pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang lengkap, yang juga termasuk laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), neraca, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Puskesmas harus disusun sesuai dengan kerangka konseptual peraturan tersebut, yang meliputi penggunaan data yang relevan, cara pengumpulan data yang benar, pengolahan data yang sesuai, penjelasan data yang jelas dan tepat. Selain itu, peraturan juga menyatakan bahwa setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran pada tingkat pemerintah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan.

Penelitian terdahulu

Beberapa buku dan penelitian sudah banyak ditulis dan diteliti oleh beberapa penulis dan peneliti tentang keterlambatan pelaporan realisasi anggaran BLUD di Puskesmas. Salah satunya oleh Ramadhani, F., & Kusuma, D.(Ramadhani, F., & Kusuma, 2019), dalam bukunya membahas berbagai tantangan dalam manajemen keuangan BLUD, termasuk masalah keterlambatan pelaporan anggaran. Penulis mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pelaporan, seperti kapasitas sumber daya manusia dan kompleksitas regulasi. Solusi yang diusulkan mencakup pelatihan berkelanjutan untuk staf keuangan dan penyederhanaan prosedur pelaporan. Sedangkan Indriantoro, N., & Supomo, B. menawarkan pendekatan praktis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk BLUD. Penulis mengidentifikasi kendala utama dalam pelaporan keuangan, seperti prosedur administrasi yang kompleks dan kurangnya pelatihan bagi staf. Rekomendasi termasuk penyederhanaan prosedur pelaporan dan pengembangan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM (Indriantoro, N., & Supomo, 2019).

Sementara itu Harmoni, M., dan Kurniawan, T. lebih kepada mengulas teori dan praktik keuangan publik di Indonesia, termasuk manajemen anggaran di sektor kesehatan. Penulis membahas berbagai faktor yang menyebabkan keterlambatan

dalam pelaporan anggaran, seperti perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi, serta masalah koordinasi antar lembaga. Penulis menyarankan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar bagian serta adaptasi terhadap perubahan regulasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang efektif (Harmoni, M., & Kurniawan, 2020).

Beberapa penelitian yang membahas tentang masalah ini diantaranya Kartika, H., & Wijaya, S. Penelitian ini mengevaluasi implementasi sistem informasi keuangan di Puskesmas BLUD dan dampaknya terhadap keterlambatan pelaporan anggaran. Ditemukan bahwa adopsi sistem informasi keuangan yang terintegrasi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan dan meningkatkan akurasi data. Penulis merekomendasikan investasi dalam teknologi informasi dan pelatihan bagi staf untuk memaksimalkan manfaat sistem tersebut (Kartika, H., & Wijaya, 2019). Sedangkan Handayani membahas efektivitas pengelolaan anggaran di Puskesmas BLUD, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaporan. Penulis menemukan bahwa kapasitas manajerial dan koordinasi yang baik antar bagian berkontribusi signifikan terhadap kelancaran pelaporan. Rekomendasi termasuk peningkatan manajemen dan pengembangan sistem koordinasi yang lebih efektif (Handayani, T., & Santoso, 2018).

Nasution, A., & Fitri, D dalam penelitiannya mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keuangan BLUD dan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kendala utama termasuk kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan pelatihan bagi staf keuangan dan modernisasi infrastruktur teknologi (Nasution, A., & Fitri, 2020).

Dari beberapa literatur dan penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa keterlambatan pelaporan realisasi anggaran BLUD di Puskesmas disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan staf keuangan, manajemen yang kurang efektif, dan sistem pelaporan yang kompleks. Faktor eksternal termasuk perubahan regulasi, ketidakpastian dalam penyaluran dana, dan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai.

Solusi yang diusulkan dalam berbagai studi mencakup peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi staf keuangan, modernisasi sistem teknologi informasi, penyederhanaan prosedur pelaporan, dan peningkatan koordinasi antar bagian. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan keterlambatan pelaporan anggaran dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Puskesmas BLUD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan realisasi anggaran pada BLUD di Puskesmas Kabupaten Bima. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks nyata dan memperoleh wawasan mendalam dari perspektif responden (Creswell, 2013). Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus eksploratif, di mana peneliti berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena keterlambatan pelaporan realisasi anggaran di BLUD secara mendalam. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen (Yin, 2018).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian, observasi langsung di lapangan, dan analisis dokumen terkait pelaporan realisasi anggaran di BLUD Puskesmas. Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan autentik (Bogdan, R. C., & Biklen, 2007). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Proses analisis melibatkan pengkodean data, pengelompokan kode-kode menjadi tema, dan interpretasi tema untuk menjawab pertanyaan penelitian (Braun, V., & Clarke, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan Geografis Dinas Kesehatan Kab. Bima

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara geografis, Kabupaten Bima terletak antara 117,40 hingga 119,2 derajat Bujur Timur (BT) dan 7,3 hingga 9,0 derajat Lintang Selatan

(LS). Luas wilayah Kabupaten Bima adalah 4.596,9 kilometer persegi. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 18 kecamatan, yang terdiri dari 191 desa dan dilayani oleh 21 Puskesmas. Dengan distribusi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Visi, Misi, dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bima memiliki visi untuk "Mewujudkan Kabupaten Bima sehat yang mandiri dan berkeadilan." Untuk mencapai visi tersebut, dinas ini menetapkan beberapa misi, yaitu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat. Fungsi utama dinas ini meliputi penyusunan perencanaan dan kebijakan di bidang kesehatan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya dan keuangan kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi kesehatan. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kerjasama di bidang kesehatan untuk memastikan layanan yang lebih efektif dan efisien.

Struktur Organisasi dan Tugas Subbagian Keuangan

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terdiri dari beberapa divisi, antara lain Divisi Sekretariat, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Penyehatan Lingkungan (P2PL), Program dan Pelaporan, Sumber Daya Kesehatan, Seksi Gizi Masyarakat, dan Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK). Subbagian Keuangan memiliki tugas melaksanakan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab atas penatausahaan keuangan, pengelolaan kas, penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi data keuangan, inventarisasi aset, serta koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait. Wewenang mereka mencakup mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta memberikan

laporan kepada Sekretaris Dinkes mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut (Lukman, 2024).

Faktor-faktor Keterlambatan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Bima NTB.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah dokumen penting untuk menilai kinerja dan akuntabilitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Di Kabupaten Bima, beberapa puskesmas mengalami keterlambatan pelaporan LRA melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dua faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini adalah status BLUD yang masih baru dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan (Nurul Wahyuti, 2024).

Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bima baru diresmikan sebagai BLUD pada Desember 2021, sehingga pelaporan keuangan baru dimulai dari 1 Januari 2023. Kesulitan dalam pelaporan keuangan melalui SIPD terjadi karena puskesmas ini masih dalam tahap belajar membuat laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan pedoman yang berlaku (Ikhsan, 2024). Narasumber dari dinas kesehatan menyatakan bahwa puskesmas memerlukan waktu untuk memahami dan melaksanakan pelaporan keuangan BLUD. Tantangan ini diperparah oleh minimnya pemahaman terkait pelaporan keuangan dan terbatasnya SDM yang terlatih di bidang akuntansi dan keuangan di BLUD puskesmas (Nurul Wahyuti, 2024).

Selain itu, keterbatasan SDM yang memiliki latar belakang akuntansi di BLUD Puskesmas juga menjadi kendala. Sebagian besar pengelola keuangan adalah perawat dan bidan, bukan akuntan profesional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan pelatihan pengelolaan keuangan kepada petugas di setiap puskesmas yang berstatus BLUD. Meskipun pelaporan keuangan sekarang menggunakan aplikasi berbasis online, masih diperlukan pemahaman mendalam di bidang akuntansi agar metode akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat disusun dengan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nurul Wahyuti, 2024).

Kendala dalam proses Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Bima NTB

Pada tahun 2023, 14 puskesmas di Kabupaten Bima baru ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diwajibkan membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun, mereka menghadapi beberapa kendala dalam pelaporan ini. Salah satu kendala utama adalah letak geografis. Kabupaten Bima memiliki wilayah yang luas dan beragam, dengan beberapa puskesmas di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Hal ini memaksa staf puskesmas untuk menempuh perjalanan jauh ke Kantor Dinas Kesehatan atau BPKAD untuk menginput data LRA secara manual, mengakibatkan keterlambatan pelaporan dan jam kerja yang tidak efektif (Nurul Wahyuti, 2024).

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni di bidang keuangan. Hanya beberapa puskesmas yang memiliki tenaga teknis dengan latar belakang pendidikan akuntansi, dan itupun berstatus tenaga sukarela atau kontrak. Kekurangan SDM ini berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang kurang akurat dan pengetahuan yang terbatas dalam menggunakan aplikasi pelaporan, menghambat proses pelaporan dan meningkatkan risiko kesalahan. Selain itu, puskesmas yang baru berstatus BLUD masih menggunakan sistem pelaporan manual dan belum terbiasa dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)(Ikhsan, 2024).

Kurangnya ketelitian dalam pembuatan laporan bulanan juga menjadi kendala dalam pelaporan LRA. Hal ini menyebabkan data yang tidak akurat dan kesulitan saat penyesuaian angka melalui SIPD. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya seperti pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi, penambahan tenaga teknis akuntansi, penerapan sistem informasi manajemen berbasis IT, dan pelatihan staf PKM tentang cara membuat laporan yang akurat dan tepat waktu (Dewi Shinta, 2024).

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi keterlambatan pelaporan Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas di Dinas Kesehatan Kab. Bima NTB.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bima telah mengambil beberapa tindakan reaktif untuk mengatasi kendala dalam pelaporan Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) Puskesmas. Tindakan-tindakan ini meliputi pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan tim dari BPKAD dan Inspektorat, yang ditujukan kepada tim penyusunan laporan keuangan Puskesmas yang terdiri dari KTU, bendahara, dan operator Puskesmas (Nurul Wahyuti, 2024).

Selain itu, Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi bulanan dengan Puskesmas terkait LRA untuk konsolidasi dan koordinasi laporan keuangan. Pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring juga terus dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban (Dewi Shinta, 2024).

Sebagai langkah lebih lanjut, dinas juga mengupayakan pengadaan aplikasi berbasis IT untuk mempercepat proses pelaporan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi keterlambatan pelaporan LRA Puskesmas, meningkatkan kapasitas sumber daya Puskesmas, dan memastikan pelaporan dapat berjalan lancar dan tepat waktu di masa mendatang (Ikhsan, 2024).

KESIMPULAN

Tahun 2023 menandai awal penetapan 14 puskesmas di Kabupaten Bima sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengharuskan mereka untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun, beberapa puskesmas mengalami keterlambatan pelaporan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dua faktor utama penyebab keterlambatan ini adalah status BLUD yang baru dan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan. Puskesmas tersebut masih dalam tahap belajar membuat laporan keuangan sesuai prosedur, dan banyak staf yang belum memiliki pemahaman mendalam terkait pelaporan keuangan BLUD.

Kendala lainnya termasuk letak geografis Kabupaten Bima yang luas dan beragam, dengan beberapa puskesmas di daerah terpencil yang memiliki akses internet terbatas. Hal ini memaksa staf puskesmas untuk menempuh perjalanan jauh ke Kantor Dinas Kesehatan atau BPKAD untuk menginput data LRA secara manual, yang menyebabkan keterlambatan pelaporan dan ketidakefektifan jam kerja. Selain itu, keterbatasan SDM di bidang keuangan juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pengelola keuangan di puskesmas adalah perawat atau bidan,

bukan akuntan profesional, yang mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima telah mengambil beberapa langkah reaktif. Mereka melakukan pembinaan dan pendampingan bersama tim dari BPKAD dan Inspektorat kepada tim penyusunan laporan keuangan puskesmas. Rekonsiliasi bulanan terkait LRA juga dilakukan untuk konsolidasi dan koordinasi laporan keuangan. Selain itu, dinas mengupayakan pengadaan aplikasi berbasis IT untuk mempercepat proses pelaporan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi keterlambatan pelaporan LRA Puskesmas, meningkatkan kapasitas sumber daya puskesmas, dan memastikan pelaporan dapat berjalan lancar dan tepat waktu di masa mendatang.

REFERENSI

- Andayani, S., & Suryani, T. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaporan Realisasi Anggaran pada BLUD. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 8(2), 45–59.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Pearson Education Inc.
- BPK.RI. (2020). *Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah*. 12 Juni 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- BPK RI. (2024). Peraturan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan. In *23 Juni 2021*.
- BPK RI. (2024). *Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)*. BPK RI.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. (3rd ed.). Sage Publications.
- Dewi Shinta. (2024). *Wawancara dengan Staff Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima*.
- Handayani, T., & Santoso, M. (2018). Efektivitas Pengelolaan Anggaran BLUD di Puskesmas. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(1), 35–50. Universitas Indonesia Press
- Harmoni, M., & Kurniawan, T. (2020). *Keuangan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia* (3rd ed.). Gramedia Pustaka Utama.

- Ikhsan. (2024). *Wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima*.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Pendekatan Praktis untuk BLUD* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Kartika, H., & Wijaya, S. (2019). Implementasi Sistem Informasi Keuangan di BLUD Puskesmas. In *Jurnal Sistem Informasi Manajemen* (1st ed., Vol. 7, Issue 2). Universitas Padjadjaran Press.
- Lukman. (2024). *Profil Dikes Bima*. 5 Maret 2024. https://dikes.bimakota.go.id/web/detail/17/tentang_kami
- Nasution, A., & Fitri, D. (2020). Kendala dan Solusi dalam Pelaporan Keuangan BLUD. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 9(4), 22–38. Universitas Sumatera Utara Press
- Nurul Wahyuti. (2024). *Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bima*.
- Pratama, Y., & Rahmawati, A. (2022). Analisis Keterlambatan Pelaporan Keuangan di Puskesmas BLUD. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 10(1), 30–44.
- Rahayu, A., et al. (2023). *Laporan Keuangan Berkualitas: Analisis Keterlambatan Pelaporan Anggaran* (1st ed.). Pustaka Ilmu.
- Ramadhani, F., & Kusuma, D. (2019). *Manajemen Keuangan BLUD: Tantangan dan Solusi* (1st ed.). ITB Press.
- Terry, George R., Rue, Leslie W. (2014). *Dasar – Dasar Manajemen, Alih Bahasa :G. A. Ticoalu*. Bumi Aksara.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (Sage Publications (ed.); 6th ed.).